#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Kecenderungan kecurangan akuntansi yang semakin marak terjadi di berbagai sektor seperti penyalahgunaan aset dan manipulasi data disebabkan karena adanya tekanan dan memanfaatkan kesempatan yang ada (Shintadevi, 2015). Kecenderungan kecurangan akuntansi adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, kecurangan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau jasa untuk kepentingan sendiri dan merugikan pemerintah (Amalia, 2015). *Fraud* atau kecurangan itu sendiri adalah tindakan yang melawan hukum oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Tuanakotta, 2007:96); Giarini (2015).

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak yang terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan (Christofel, 2010); Bartenputra (2016). Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sering dilakukan oleh seseorang dengan jabatan atau wewenang yang tinggi pada suatu perusahaan. Frekuensi *fraud* 

jenis ini lebih jarang dibandingkan dengan asset missapropriation akan tetapi lebih merugikan perusahaan dikarenakan nominalnya yang relatif lebih tinggi.

Pada sektor publik maupun swasta telah banyak ditemui kasus-kasus kecurangan terutama kasus korupsi. Pada tahun 2019, *Transparency International* memaparkan mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2018 dengan hasil skor antara 0-100. Dimana indeks tersebut semakin mendekati skor nol, maka semakin tinggi tingkat korupsi yang ada pada sustu negara. Sebaliknya, jika skor mendekati ke angka 100, maka semakin rendah tingkat korupsi pada suatu negara, yang artinya Negara tersebut dapat dikatakan sangat bersih. Berdasarkan hasil survey terhadap 180 negara, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama pada tahun 2017, yaitu 37 Sehingga tingkat korupsi di Indonesia dapat dikatakan masih tinggi, karena jauh dari skor 100. Peneliti Divisi *Investigasi Indonesia Corruption Watch* (ICW; 2018) Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar.

Wana (2018) mengatakan, kerugian negara naik dari Rp 1,5 triliun pada 2016 menjadi Rp 6,5 triliun pada 2017. Penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan jumlah kerugian negara yang besar, yaitu sekitar Rp 2,3 triliun. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi dalam aspek jumlah tersangka. Selama satu tahun, jumlah tersangka meningkat dari 1.101 menjadi 1.298 orang. Menurut Wana (2018), banyaknya Kepala Daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terhadap

peningkatan jumlah tersangka. Dari sebelumnya hanya 21 tersangka Kepala Daerah, tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) menjelaskan *fraud* (kecurangan akuntansi) sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam hal ini, kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Kecurangan akuntansi yang berkembang secara luas menimbulkan kerugian yang sangat besar hampir diseluruh industri. Kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Tindakan seorang pemimpin maupun orang yang diberi wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab. Tindakan curang dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng pernah menjadi sorotan publik karena sempat terjadi kasus yang mengarah pada kecurangan dilakukan oleh pihak internal instansi itu sendiri. Menurut Beritabali (2016), telah terjadi kasus dugaan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 yang dilakukan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Buleleng yang mengakibatkan kerugian pada negara mencapai 699 juta rupiah.

Pembangunan jembatan di Desa Lemukih berlangsung di tahun 2013 lalu, dengan sumber dana dari APBD Buleleng senilai Rp 2,5 miliar lebih. Jembatan tersebut dibangun di atas Pangkung (Sungai) Lebong, dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih dan selesai di tahun 2014.

Kasus ini mencuat sejak tahun 2015 lalu. Penyidik Polda Bali menemukan pelanggaran dengan modus membuat pertanggungjawaban fiktif. Dalam dokumen yang ditemukan, proyek itu baru rampung 22 persen, namun dibuat telah rampung 45 persen. Kasus seperti itu terjadi dikarenakan lemahnya pengendalian internal dari instansi/organisasi tersebut. Maka dari itu dibutuhkan tata kelola yang baik dari manajemen suatu organisasi/perusahaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi nya kecenderungan kecurangan (*fraud*), seperti pengendalian internal yang kurang efektif, kompensasi yang belum sesuai, dan asimetri informasi.

Menurut penelitian Committee of Sponsoring Organization (COSO); Lutfi (2017), pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dapat tercapai. Menurut Abbot, et al., seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006: 5); Amalia (2015) menyatakan bahwa pengendalian intern yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan. Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi. Adanya pengendalian internal yang efektif, memungkinkan terjadinya pengecekan silang (cross check) terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini menurunkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan dan mengalokasikan kesalahan. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif, yang diantara melakukan pengawasan yang ketat pada setiap proyek yang dilakukan dan mengevaluasi bahwa kegiatan yang dilakukan memang benar dan sesuai dengan prosedur. Keefektifan pengendalian internal juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.

Fraud atau Kecurangan erat hubungannya dengan Pengendalian Internal (Internal Control). Pengendalian internal merupakan cara yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mengurangi potensi timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi dalam sistem yang ada di perusahaan (Fajrin, 2017). Penelitian Prawira (2014) menunjukkan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. Hasil penelitian yang senada dinyatakan Rahmaidha (2016) dan Ninggrum (2013); Widiutami (2017) yang membuktikan bahwa secara parsial efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk

berlaku curang dalam akuntansi. Jadi dapat diasumsikan bahwa, pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Selain itu faktor berikutnya yaitu kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. "Kompensasi acap kali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi" (Panggabean, 2002:10). Dengan kompensasi yang sesuai, kecenderungan akuntansi diharapkan dapat berkurang. Sesuainya kompensasi yang dimaksud yaitu pada saat waktu pemberian gaji. Dalam hal ini apabila waktu pemberian gaji tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak tepat nya pemberian gaji pada pegawai, pegawai akan enggan untuk melakukan kecurangan. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi dan tidak melakukan kecenderungan kecurangan dalam akuntansi demi memaksimalkan keuntungan pribadi.

Thoyibatun (2009); Nasution (2017) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan menggunakan variabel pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi dapat diasumsikan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Menurut Tunggal (2010); Megawati (2018) pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arens (2008) bahwa manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi risiko *fraud*. Perlindungan dan pendeteksian. Manajemen dapat mencegah *fraud* dengan mempersempit kesempatan, dengan pendeteksian *fraud* dan pemberian hukuman bagi pelaku *fraud*.

Selain itu faktor yang juga dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi adalah asimetri informasi. Nicholson (1997: 487- 489); Bartenputra (2016) mencatat bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen dipengaruhi oleh situasi asimetri informasi. Asimetri informasi adalah situasi ketika terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi disebabkan oleh permasalahan keagenan yang terjadi bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Selanjutnya asimetri informasi merupakan suatu keadaan dima<mark>n</mark>a agent m<mark>emiliki akses informasi yang tidak dimili</mark>ki oleh pihak prinsipal. Dalam kasus yang dipaparkan sebelumnya penyidik Polda Bali menemukan pelanggaran dengan modus membuat pertanggungjawaban fiktif. Dalam dokumen ya<mark>ng ditemukan, proyek itu baru rampun</mark>g 22 persen, namun dibuat telah rampung 45 persen, hal ini disampaikan oleh penyidik Polda Bali. Dimana bahwa pelaku dalam kasus tersebut telah melakukan manipulasi dokumen yang tidak diketahui oleh pihak lain, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan realita.

Problem asimetris informasi menggambarkan ada ketimpangan penguasaan informasi. Satu pihak menikmati surplus, pihak lain menderita defisit informasi.

Dalam proses kebijakan publik, misalnya, para pengambil keputusan itu menikmati surplus informasi, sementara publik menderita defisit informasi. Akan tetapi, di antara para pengambil keputusan pun terjadi asimetris informasi. Contoh misalnya, tidak semua pejabat pemerintah atau anggota DPR tahu tentang anggaran proyek pembangunan. Hanya Badan Anggaran yang lebih banyak tahu tentang hal itu. Demikian juga dalam Badan Anggaran ada diferensiasi penguasaan informasi. Sangat mungkin ketua Badan Anggaran lebih banyak tahu tentang anggaran proyek pembangunan ketimbang anggota yang lain. Sehingga apabila Badan Anggaran memanipulasi atau membuat laporan dengan realisasi yang tidak sesuai dengan realita, maka pihak lain tidak akan mengetahui bahwa laporan tersebut telah dimanipulasi karena penguasaan informasi yang kurang.

Asimetri informasi muncul ketika agent lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan principal dan *stakeholder* lainnya. Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholder*). Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Jadi dalam penelitian ini, *opportunity* dalam teori *fraud triangle* diproksikan dengan persepsi mengenai penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, dan asimetri informasi.

Anthony dan Govindarajan (2005) dalam penelitian Bartenputra (2016), menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu principal (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya. Hal ini juga terjadi di

pemerintahan disaat proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi dimana eksekutif mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan, yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverce selection, asimetri informasi terjadi karena legislatif tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja eksekutif, legislatif tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha eksekutif memberikan kontribusi pada hasil actual pada suatu organisasi pemerintahan. Bila terjadi asimetri informasi, agen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi untuk memperoleh kompensasi yang prinsipal, demi motivasi mempertahankan jabatan dan lain-lain (Khang, 2002); Gayatri (2017). Sehingga dalam hal ini, asimetri informasi memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Seperti kasus dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana atasan memiliki informasi yang lebih <mark>b</mark>anyak, sehingga ia lebih mudah <mark>untuk</mark> melakukan kecurang<mark>a</mark>n yang bias dalam membuat laporan keuangan jadi bawahan tidak akan mengetahui informasi yang sebenarn<mark>y</mark>a, begitu jug<mark>a bawahan hanya menget</mark>ahui hasil d<mark>ar</mark>i laporan yang dibuat itu sudah sesuai dengan realita. Dengan demikian alasan peneliti mengambil penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena adanya indikasi kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak atasan dalam melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat.

Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat memberikan warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkaan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi

daerah dalam bidang pekerjaan umum. Untuk mewujudkan tujuan pekerjaan pemerintahan yang berkualitas manajemen sumber daya manusia harus benar-benar dikelola.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan serta Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (a)Permusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, (b)Pengendalian pemanfaatan tata ruang Kabupaten, (c)Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, (d)Pembangunan, penggantian dan pemeliharaan jembatan, (e)Pembangunan, dan pemeliharaan pengairan, (f)Pembinaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral, (g)Pembinaan bangunan gedung dan perumahan, (h)Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, (i)Pengelolaan tata usaha Dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Buleleng merupakan kantor dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk wilayah Kabupaten Buleleng, provinsi Bali. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastrukur dan perumahan untuk daerah Kabupaten Buleleng, Bali.

Terkait dengan wewenang tersebut, maka melalui kantor ini beberapa surat perizinan diproses. Beberapa surat tersebut seperti Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui kedinasan ini pula urusan pembebasan lahan proyek infrastruktur pemerintah dilakukan.

Penelitan ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sri Widiutami pada tahun 2017 dengan judul "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng. Persamaannya dengan penelitian ini adalah adanya variable bebas yang sejenis dan terikat yang sama seperti pengendalian internal pada variabel bebasnya dan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada variabel terikatnya.

Perbedannya adalah adanya variabel bebas baru yaitu kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan tempat penelitian yang berbeda juga. Penggunaan kesesuaian kompensasi sebagai variabel bebas baru adalah kecenderungan para pelaku dalam melakukan sebuah kecurangan adalah tekanan dari faktor ekonomi, ketika seseorang memiliki kebutuhan/keinginan mendesak dan tidak dapat terpenuhi maka mereka akan melakukan kecurangan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, serta variable bebas asimetri informasi, dimana sesorang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari atasan, sehingga seseorang dapat melakukan kecurangan dengan menggunakan informasi yang telah dia ketahui lebih dari atasan sebagai seorang yang bertanggungjawab dimana mereka bekerja. Tempat penelitian yang dipilih adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis membuat judul "Pengaruh Kefeektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng".

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalahmasalah berikut:

- Rendah nya sikap mengenai peraturan yang ada dan seakan tidak peduli terhadap tindakan kecurangan.
- Kurangnya intelektual yang dimiliki pegawai sehingga banyak di antara mereka yang melakukan kecurangan.
- 3. Tidak sesuainya pemberian kompensasi sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan
- 4. Kurangnya pengendalian internal yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng yang dapat menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terjadinya ketidakselarasan informasi antara pihak prinsipal dengan pihak pengelola laporan, sehingga menyebabkan peluang bagi pihal pengelola melalukan kecurangan manipulasi laporan.

## 1.3 Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, dimana peneliti membatasi permasalahan yang hanya berkaitan dengan pengaruh keefektifan pegendalian internal  $(X_1)$ , presepsi kesesuaian kompensasi  $(X_2)$ , dan asimetri informasi  $(X_3)$  terhadap kecenderungan kecurngan (fraud) akuntansi (Y). Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) Akuntansi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng?
- 2. Bagaimana pengaruh Presepsi Keseuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) Akuntansi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng?
- 3. Bagaimana pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) Akuntansi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) Akuntansi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.
- Untuk mengetahui pengaruh pengaruh Presepsi Keseuaian Kompensasi
  Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi Pada Dinas
  Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.

Untuk mengetahui pengaruh pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi civitas akademika dan dapat menjadi referensi mengenai Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Selain itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian penelitian – penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

### 2. Manfaat Praktis

## a) Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah menambah pemahaman tentang Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) Akuntansi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.

# b) Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan sistem pengendalian yang ada di dalam dinas tersebut serta agar dapat mendorong perilaku etis karyawan sehingga dapat mencegah terjadinya fraud pada Dinas Pekerjaan Umum. Serta memberikan kompensasi yang sesuai kepada pegawai dapat memotivasi pegawai sehingga

mendorong pegawai untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan/instansi. Dan juga pihak yang memiliki informasi lebih banyak tidak menggunakan asimetri informasi dengan sewenangnya agar meminimkan tindakan *fraud*.

# c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga yang ada dan dapat menambah sumber bacaan ilmiah atau referensi.

